

Menuju Demokrasi Terpimpin 1950 s/d 1959

Dinamika Politik 1950-1959

Peta Kekuatan Politik Nasional 1960-1965

Pembebasan Irian Barat

Konfrontasi Terhadap Malaysia

Konsepsi Presiden 1957

Upaya menuju Demokrasi Terpimpin

Konflik terbuka (Presiden dan DPR)

diberlakukannya S.O.B

Kekuatan Politik Baru TNI AD dan PKI

Pembubaran partai Masyumi dan PSI

Konferensi Maphilindo (Malaysia, Philipina dan Indonesia) di Filipina 31 Juli-5 Agustus 1963

hubungan diplomatik Indonesia Malaysia diputuskan 17 September 1963

memutuskan pula hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah 21 September 1963

pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957

Decrit Presiden 5 Juli 1959

6 Juli 1959 Pembubaran Kabinet Karya & 10 Juli 1959 Pembentukan Kabinet Kerja

Tri Komando Rakyat (TriKora) 19 Desember 1961

Kapal MTB Macan Tutul, berhasil ditembak Belanda sehingga kapal terbakar dan tenggelam

Perjanjian New York 15 Agustus 1962

penyerahan kekuasaan Pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah Republik Indonesia di Kota Baru/Hollandia/Jaya Pura 1 Mei 1963

Konferensi Maphilindo (Malaysia, Philipina dan Indonesia) di Filipina 31 Juli-5 Agustus 1963

hubungan diplomatik Indonesia Malaysia diputuskan 17 September 1963

memutuskan pula hubungan ekonomi dengan Malaya, Singapura, Serawak dan Sabah 21 September 1963

Presiden RI menghadiri pertemuan puncak di Tokyo 20 Juni 1964

Indonesia keluar dari PBB 7 Januari 1965

Presiden Soekarno mengucapakan Dwi Komando Rakyat (Dwi Kora) 3 Mei 1964

DPR menolak Rencana Anggaran Belanja Negara tahun 1960

pembubaran DPR 5 Maret 1960

mendirikan DPR Gotong Royong (DPRGR) dan Pelantikan anggota DPRGR dilaksanakan pada 25 Juni 1960

membentuk suatu lembaga baru "Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi" (MPPR) berdasarkan Penetapan Presiden No. 4/1962. MPPR merupakan badan pembantu Pemimpin Besar Revolusi (PBR)

Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 menerima hasil Pepera yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia secara de Jure dan de Facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI.